

# LAPORAN KINERJA INTERNAL PEMERINTAH (LKjIP)



INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG



## TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Kabupaten Jombang menyusun laporan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Jombang.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dengan menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran dan fungsi Inspektorat dalam kegiatan pengawasan sehingga mendukung kinerja Inspektorat mewujudkan pengawasan yang berkualitas, efektif dan efisien.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk bahan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang sekaligus sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang.

Jombang, 30 Januari 2023  
INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG  
  
ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670105 199212 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	iii
Ringkasan Eksekutif .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Struktur Organisasi .....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
1.3 Isu Strategis .....	3
1.4 Cascading Kinerja (Matrik Peran Hasil) .....	4
1.5 Peta Proses Bisnis .....	7
1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi .....	11
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis .....	14
2.2. Rencana Kerja Tahun 2022 .....	15
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	15
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	24
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir .....	26
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Akhir jangka menengah (Renstra) .....	28
3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional .....	29
3.1.5 Analisis atas realisasi kinerja .....	30
3.2. Realisasi Anggaran .....	31
3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dan realisasi anggaran .....	34
3.2.2. Efisiensi penggunaan sumber daya .....	35
3.3. Upaya Perbaikan Kinerja .....	39
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
Lampiran	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2022 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2022 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Kabupaten Jombang. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan rata-rata capaian kinerja 97,51%. Semua pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target terdapat tingkat efisiensi anggaran rata-rata sebesar 9,59% dengan penyerapan anggaran tahun 2022 dari sisi belanja mencapai 93,17%, sedangkan tingkat efisiensi Sumber Daya Manusia sebesar 17,07% dari ketersediaan pegawai sebesar 80,44%.

Namun keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak lepas dari kendala/ hambatan antara lain :

1. Register Risiko dalam mencapai target kinerja OPD belum menjadi perhatian dari OPD.
2. Kurangnya *update* data atas kegiatan Inspektorat yang mendukung penilaian Kapabilitas APIP.
3. Jenis pemeriksaan dan jumlah obyek pemeriksaan yang berupa mandatory dari pemerintah pusat atas kondisi terkini menyebabkan banyaknya penugasan di luar PKPT.

Terhadap hambatan/masalah tersebut dilakukan Strategi/upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan berupa konsultasi kepada auditan (OPD) berupa reviu Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian pada seluruh OPD.
2. Melakukan *update* data secara berkala atas pemenuhan elemen penilaian kapabilitas APIP.

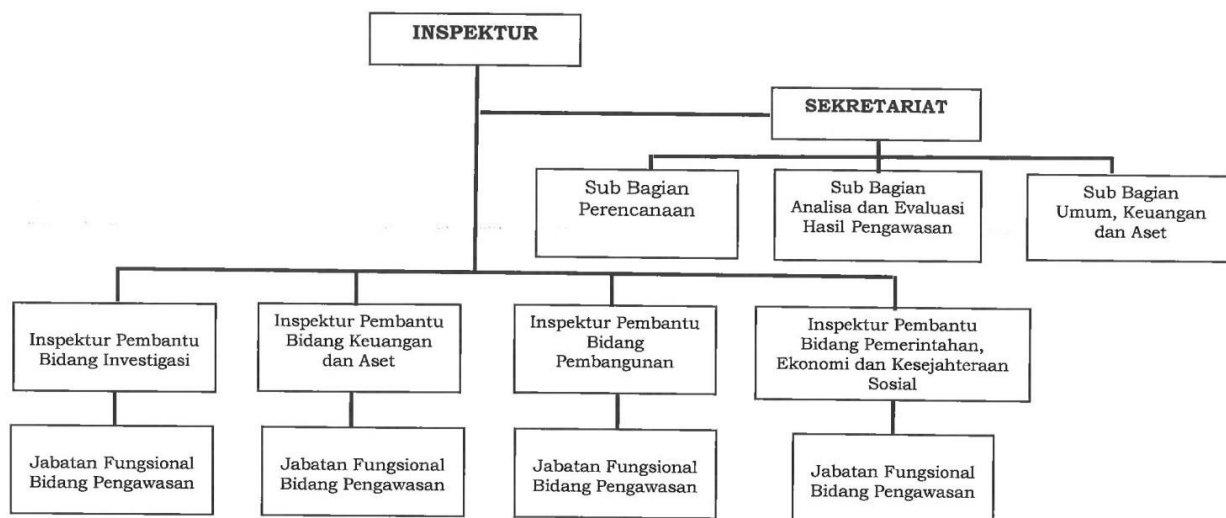
3. Melakukan koordinasi yang baik dan secara terus menerus dengan BPKP dalam upaya mempertahankan Kapabilitas APIP (Level 3).
4. Dilaksanakannya Perubahan PKPT untuk penyesuaian atas tugas mandatory.
5. Secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja intern Inspektorat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang, maka susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang**

#### 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 63 Tahun 2020, Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten, Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan sistem mekanisme auditing yang professional dan objektif. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Pemerintah Daerah;



2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, sidak dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* serta pelayanan publik;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Jombang didukung dengan sumber daya aparatur sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Jombang yang terdiri :

PNS : 74 orang

Non PNS : 4 (empat) orang

- b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan golongan :

**Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	6	6	1	-	13
2	III	11	5	10	8	34
3	II	-	-	27	-	27
4	I	-	-	-	-	0
<b>JUMLAH</b>						<b>74</b>

- c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan pendidikan :

**Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	11
2	Sarjana S1/D-IV	36
3	Diploma III	27

No	Pendidikan	Jumlah
4	SMA (Sederajat)	-
5	SMP (Sederajat)	-
6	SD (Sederajat)	-
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>

d. Sumber Daya Aparatur berdasarkan jabatan :

**Tabel 1.3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah
1.	<b>Jabatan Struktural</b>	<b>7</b>
	Inspektur (Eselon II)	1
	Sekretaris (Eselon III)	1
	Inspektur Pembantu Bidang (Eselon III)	4
	Kasubag (Eselon IV)	1
2.	<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>62</b>
	Auditor Ahli Madya	6
	Auditor Ahli Muda	16
	Auditor Ahli Pertama	13
	Auditor Pelaksana	25
	P2UPD	1
	Perencana Ahli Muda	1
3.	<b>Jabatan Fungsional Umum</b>	<b>5</b>

e. Non PNS : 4 (empat) orang

### 1.3 Isu Strategis

Isu Strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang yang selaras dengan Misi ke-1 Kabupaten Jombang, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional”. Dengan Tujuan yang diampu Inspektorat yaitu “Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”.

Isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jombang, yaitu :

1. Upaya peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jombang
2. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko.
3. Pengendalian Internal pada Organisasi Pemerintah Daerah SPIP pada level



3(terdefinisi).

4. Upaya peningkatan Kapabilitas APIP level 3
5. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) melalui Monitoring Centre For Prevention (MCP) Korsubgah KPK-RI.
6. Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Kabupaten Jombang Menuju WBK/WBBM.
7. Hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang belum memperoleh nilai A.
8. Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah belum optimal.

#### **1.4 Cascading Kinerja (Matrik Peran Hasil)**

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang. Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang terkait dengan pencapaian misi pertama.

Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional”, dengan tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan dan Efektif Serta Penyelenggaraan Layanan Publik Yang Berkualitas”. Indikator tujuan RPJMD dari misi pertama ini adalah “Indeks Good Governance”. Inspektorat Kabupaten Jombang mendukung sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” dengan indikator sasaran “Indeks Reformasi Birokrasi”.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu

Adapun Tujuan Inspektorat Kabupaten Jombang adalah ‘Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” dengan sasaran strategis ada 2 (dua) yaitu “Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan Akuntabel “ dan “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah”.

Gambar 1.2 Matrik Peran Hasil Eselon III Inspektorat Kabupaten Jombang

Gambar 1.3 Matrik Peran Hasil Sekretariat Inspektorat Kabupaten Jombang

NO	PEGAWAI	JABATAN	OUTCOME / OUTCOME ANTARA / OUTPUT / LAYANAN							
1	LILIES WIDIANINGSIH, SE., Msi,	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset	Persentase rekomendasi hasil revaluasi perencanaan dan penganggaran yang telah ditindak lanjut	Persentase rekomendasi hasil revaluasi SSH Non Konstruksi yang telah ditindak lanjut	Persentase rekomendasi hasil revaluasi Laporan Keuangan yang telah ditindak lanjut	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang telah ditindak lanjut	Persentase rekomendasi hasil revaluasi lainnya yang telah ditindak lanjut	Persentase rekomendasi hasil Audit Kinerja yang telah ditindak lanjut	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan reformasi birokrasi (PMRB dan SAKIP) yang telah ditindak lanjut	Jumlah draft kebijakan teknis pengawasan yang dirumuskan
3	RIRIS ERNAWATI, SE	Auditor Madya	Terselenggaranya Revaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran	Terselenggaranya revaluasi SSH dan ASB Non Konstruksi	Terselenggaranya revaluasi laporan keuangan (LK dan SO)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya revaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Insentif Tenaga Kesehatan	Terselenggaranya Audit Kinerja	Terselenggaranya hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	
4	NINA ROSALINA, SE	Auditor Muda	Terselenggaranya Revaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran	Terselenggaranya revaluasi SSH dan ASB Non Konstruksi	Terselenggaranya revaluasi laporan keuangan (LK dan SO)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya revaluasi Insentif Tenaga Kesehatan		Terselenggaranya hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	
5	EKO ADI CANDRA, S.E.	Auditor Muda	Terselenggaranya Revaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran		Terselenggaranya revaluasi laporan keuangan (LK dan SO)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya revaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Insentif Tenaga Kesehatan	Terselenggaranya Audit Kinerja	Terselenggaranya hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	
6	ELITA DWI MEIRANY, SE	Auditor Pertama	Terselenggaranya Revaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran	Terselenggaranya revaluasi SSH Non Konstruksi	Terselenggaranya revaluasi laporan keuangan (LK dan SO)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya revaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Insentif Tenaga Kesehatan		Terselenggaranya hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	
7	FITRIYANINGRUM NUR HIDAYAH, S.A.	Auditor Pertama	Terselenggaranya Revaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran	Terselenggaranya revaluasi SSH Non Konstruksi	Terselenggaranya revaluasi laporan keuangan (LK dan SO)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya revaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Insentif Tenaga Kesehatan	Terselenggaranya Audit Kinerja	Terselenggaranya hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	
8	YOGA PRATAMA, S.E	Auditor Pertama	Terselenggaranya Revaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran	Terselenggaranya revaluasi ASB Non Konstruksi	Terselenggaranya revaluasi laporan keuangan (LK dan SO)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya revaluasi Insentif Tenaga Kesehatan	Terselenggaranya Audit Kinerja	Terselenggaranya hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	
9	RISKA INDAH SUCI HARINI, S.E.	Auditor Pertama	Terselenggaranya Revaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran	Terselenggaranya revaluasi SSH Non Konstruksi	Terselenggaranya revaluasi laporan keuangan (LK dan SO)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya revaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Insentif Tenaga Kesehatan	Terselenggaranya Audit Kinerja	Terselenggaranya hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	
10	LINA TRI JAYANTI, SE	Auditor Pertama	Terselenggaranya Revaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran	Terselenggaranya revaluasi ASB Non Konstruksi	Terselenggaranya revaluasi laporan keuangan (LK dan SO)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya revaluasi Insentif Tenaga Kesehatan	Terselenggaranya Audit Kinerja	Terselenggaranya hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	
11	DWI PUJI SULISTIYA, A.Md.	Auditor Terampil Pelaksana	Terselenggaranya Revaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran	Terselenggaranya revaluasi ASB Non Konstruksi	Terselenggaranya revaluasi laporan keuangan (LK dan SO)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya revaluasi Insentif Tenaga Kesehatan		Terselenggaranya hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	
12	REZHA NOVADRIANTO, A.Md.	Auditor Terampil Pelaksana	Terselenggaranya Revaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran	Terselenggaranya revaluasi ASB Non Konstruksi	Terselenggaranya revaluasi laporan keuangan (LK dan SO)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya revaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Insentif Tenaga Kesehatan		Terselenggaranya hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	
13	ZAYYA ALMAS SALSABILA, A.Md.Ak.	Calon Auditor Terampil Pelaksana	Terselenggaranya Revaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran	Terselenggaranya revaluasi SSH Non Konstruksi	Terselenggaranya revaluasi laporan keuangan (LK dan SO)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya revaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Insentif Tenaga Kesehatan		Terselenggaranya hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	
14	ZUMA BIRHOMATIKA, A.Md.Ak.	Calon Auditor Terampil Pelaksana	Terselenggaranya Revaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran	Terselenggaranya revaluasi ASB Non Konstruksi	Terselenggaranya revaluasi laporan keuangan (LK dan SO)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya revaluasi Insentif Tenaga Kesehatan		Terselenggaranya hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	
15	ARI RAHMANSYAH DWI PRASETYO, A.Md.Farm	Calon Auditor Terampil Pelaksana	Terselenggaranya Revaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran	Terselenggaranya revaluasi SSH Non Konstruksi	Terselenggaranya revaluasi laporan keuangan (LK dan SO)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya revaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Insentif Tenaga Kesehatan		Terselenggaranya hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	
16	BUYUNG AJI PAMUNGKAS, A.Md.M.	Calon Auditor Terampil Pelaksana	Terselenggaranya Revaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran	Terselenggaranya revaluasi ASB Non Konstruksi	Terselenggaranya revaluasi laporan keuangan (LK dan SO)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu			Terselenggaranya hasil pelaksanaan asistensi dan pendampingan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	

Gambar 1.4 Matrik Peran Hasil Bidang Keuangan dan Aset Inspektorat Kabupaten Jombang

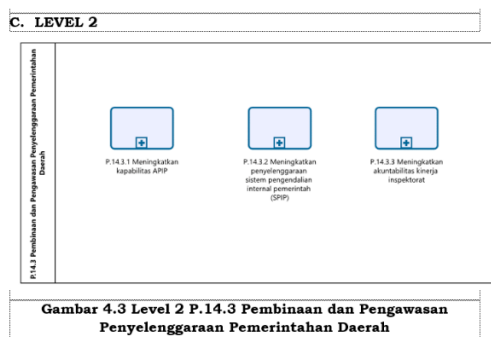
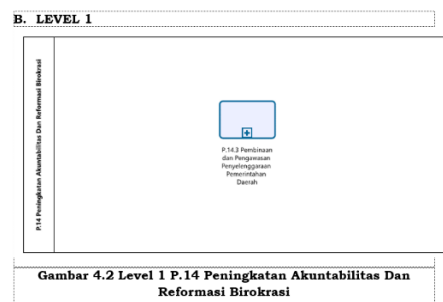
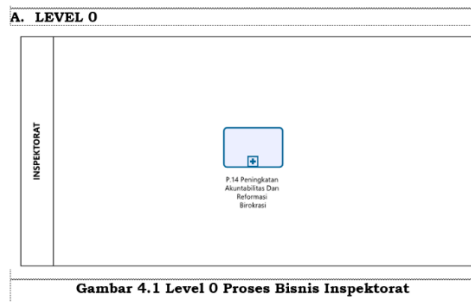
Matriks Pembagian Peran dan Hasil Bidang Pengembangan Inspektorat										
NO	PEGAWAI	JABATAN	OUTCOME / OUTCOME ANTARA / OUTPUT / LAYANAN							
1	ABDUL HADZID KINYOAGUNA, S.H., M.Si.	Inspektur	Persentase rata-rata capaian kinerja pegawai							
2	Dr. E. MUH. BADIOWI, M.H.	Sekretaris	Tertarikannya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai dengan aturan	Tertarikannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	Tertarikannya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah sesuai aturan	Tertarikannya Pemenuhan Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Tertarikannya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai aturan	Tertarikannya Pemenuhan Perizinan Jasa Pengurus Pemerintah Daerah	Tertarikannya Pemeliharaan BMD Perangkat Daerah	Tertarikannya Pemenuhan Kebijakan Teknis & Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan sesuai aturan
3	AGUNG HARADI, S.T., N.M.	Inspektur Pembantu Bidang Pengembangan								
NO	PEGAWAI	JABATAN	OUTCOME / OUTCOME ANTARA / OUTPUT / LAYANAN							
1	AGUNG HARADI, S.T., N.M.	Inspektur Pembantu Bidang Pengembangan	Persentase Rekomendasi Hasil Revaluasi Audit yang Telah Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil Revaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Risk yang Telah Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil Revaluasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang Telah Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa yang Telah Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil Revaluasi ASB dan SSH Konstruksi yang Telah Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu yang Telah Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP) yang Telah Ditindaklanjuti	Jumlah Draft Kebijakan Teknis Pengawasan yang Dirumuskan
2	ABD. WAHID, S.E.	Auditor Madya	Terselenggaranya Pemeriksaan Proby Audit	Terselenggaranya Revaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Risk	Terselenggaranya Revaluasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Terselenggaranya Revaluasi Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya Revaluasi ASB dan SSH Konstruksi	Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	
3	AHMAD HASAN BUCHORI, S.T.	Auditor Muda	Terselenggaranya Pemeriksaan Proby Audit	Terselenggaranya Revaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Risk	Terselenggaranya Revaluasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Terselenggaranya Revaluasi Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya Revaluasi ASB dan SSH Konstruksi	Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	
4	TAUFIK AKBAR SOLIKIN, S.T.	Auditor Muda	Terselenggaranya Pemeriksaan Proby Audit	Terselenggaranya Revaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Risk	Terselenggaranya Revaluasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Terselenggaranya Revaluasi Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya Revaluasi ASB dan SSH Konstruksi	Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	
5	RANGGA KUSUMA, S.A.B.	Auditor Muda	Terselenggaranya Pemeriksaan Proby Audit	Terselenggaranya Revaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Risk	Terselenggaranya Revaluasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Terselenggaranya Revaluasi Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya Revaluasi ASB dan SSH Konstruksi	Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	
6	ISA WHESNU YUDISTIRA, S.E.	Auditor Muda	Terselenggaranya Pemeriksaan Proby Audit	Terselenggaranya Revaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Risk		Terselenggaranya Revaluasi Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya Revaluasi ASB dan SSH Konstruksi	Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	
7	YUNI PRATISARI, S.P.	Auditor Muda	Terselenggaranya Pemeriksaan Proby Audit	Terselenggaranya Revaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Risk	Terselenggaranya Revaluasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)		Terselenggaranya Revaluasi ASB dan SSH Konstruksi	Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	
8	DWI ANITA MARETICA SARU, S.E.	Auditor Pertama	Terselenggaranya Pemeriksaan Proby Audit	Terselenggaranya Revaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Risk			Terselenggaranya Revaluasi ASB dan SSH Konstruksi	Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	
9	GIYA PRATIWI, S.E.	Auditor Pertama	Terselenggaranya Pemeriksaan Proby Audit	Terselenggaranya Revaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Risk	Terselenggaranya Revaluasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Terselenggaranya Revaluasi Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya Revaluasi ASB dan SSH Konstruksi	Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	
10	IBBA SHONIA NUR A' ZAHRI, S.T.	Auditor Pertama	Terselenggaranya Pemeriksaan Proby Audit	Terselenggaranya Revaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Risk	Terselenggaranya Revaluasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Terselenggaranya Revaluasi Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya Revaluasi ASB dan SSH Konstruksi	Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	
11	DEVITA ROSALIA, S.T.	Auditor Pertama	Terselenggaranya Pemeriksaan Proby Audit	Terselenggaranya Revaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Risk	Terselenggaranya Revaluasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Terselenggaranya Revaluasi Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya Revaluasi ASB dan SSH Konstruksi	Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	
12	MUHAMMAD FAIZ, A.Md.	Auditor Pelaksana	Terselenggaranya Pemeriksaan Proby Audit	Terselenggaranya Revaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Risk				Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	
13	EVILLYIA RACHPRATIKA, A.Md.	Auditor Pelaksana	Terselenggaranya Pemeriksaan Proby Audit	Terselenggaranya Revaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Risk				Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	
14	RISMA FARABILA, A.Md.Ak.	Auditor Pelaksana	Terselenggaranya Pemeriksaan Proby Audit	Terselenggaranya Revaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Risk			Terselenggaranya Revaluasi ASB dan SSH Konstruksi	Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	
15	ILHAM ZAKARIA, A.Md.T.	Auditor Pelaksana	Terselenggaranya Pemeriksaan Proby Audit	Terselenggaranya Revaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Risk			Terselenggaranya Revaluasi ASB dan SSH Konstruksi	Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	
16	LINDA ESTIG HARHARA, A.Md.Ak.	Auditor Pelaksana	Terselenggaranya Pemeriksaan Proby Audit	Terselenggaranya Revaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Risk				Terselenggaranya Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB dan SAKIP)	Terselenggaranya Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	

Gambar 1.5 Matrik Peran Hasil Bidang Pengembangan Inspektorat Kabupaten Jombang

Gambar 1.5 Matrik Peran Hasil Bidang Pembangunan Inspektorat Kabupaten Jombang

Gambar 1.5 Matrik Peran Hasil Bidang Investigasi Inspektorat Kabupaten Jombang

instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Peta proses bisnis Inspektorat Kabupaten Jombang menggunakan level/tingkatan, yakni dari level 0, level 1, level 2 sampai dengan terpetakan lintas fungsi.



Gambar 3.3 Peta Proses Bisnis Level 0, Level 1 dan Level 2 Inspektorat Kab. Jombang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah, mendefinisikan peta proses bisnis adalah digram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Tujuan diadakannya Proses Bisnis adalah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai Proses Bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, serta memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai Proses Bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta Proses Bisnis yang dimiliki instansi pemerintah dan pemerintah daerah, berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta Proses Bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta Proses Bisnis level-n.

Adapun peta proses bisnis Inspektorat Kabupaten Jombang dari Level 0 hingga Level 5, sebagai berikut :

Level 0 Proses Bisnis Inspektorat

Level 1 P.14 Peningkatan Akuntabilitas Dan Reformasi Birokrasi

Level 2 P.14.3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Level 3 P.14.3.1 Meningkatkan kapabilitas APIP

Level 3 P.14.3.2 Meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

Level 3 P.14.3.3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat

Level 4 P.14.3.1.1 Menjamin efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Level 4 P.14.3.1.2 Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola

Level 4 P.14.3.2.1 Meningkatkan Lingkungan pengendalian

Level 4 P.14.3.2.2 Meningkatkan Penilaian risiko

Level 4 P.14.3.2.3 Meningkatkan Kegiatan Pengendalian

Level 4 P.14.3.2.4 Meningkatkan kegiatan informasi dan komunikasi

Level 4 P.14.3.2.5 Meningkatkan pemantauan dan pengendalian intern

Level 4 P.14.3.3.1 Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai dengan aturan

Level 4 P.14.3.3.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian

Level 4 P.14.3.3.3 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan BMD

Level 4 P.14.3.3.4 Meningkatkan kualitas administrasi pengelolaan keuangan

Level 4 P.14.3.3.5 Meningkatkan kualitas pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Level 5 P.14.3.1.1.1 Meningkatkan kualitas Audit

Level 5 P.14.3.1.1.2 Meningkatkan kualitas Reviu

Level 5 P.14.3.1.1.3 Meningkatkan kualitas Monitoring dan Evaluasi

Level 5 P.14.3.1.2.1 Meningkatkan kualitas asistensi

Level 5 P.14.3.1.2.2 Meningkatkan kualitas fasilitasi dan konsultasi

Level 5 P.14.3.2.1.1 Mengawal survei penilaian integritas

Level 5 P.14.3.2.1.2 Pembelajaran anti korupsi dan sosialisasi

Level 5 P.14.3.2.1.3 Menyusun perbub atau aturan kode etik sesuai dengan tugas dan fungsi

Level 5 P.14.3.2.2.1 Melaksanakan Identifikasi risiko

Level 5 P.14.3.2.2.2 Melaksanakan Analisa risiko

Level 5 P.14.3.2.3.1 Melakukan Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah

Level 5 P.14.3.2.3.2 Melakukan Pembinaan sumber daya manusia

Level 5 P.14.3.2.3.3 Melakukan Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Level 5 P.14.3.3.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai dengan aturan

Level 5 P.14.3.3.2.2 Melaksanakan pengelolaan kepegawaian Inspektorat



## 1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Jombang memperoleh nilai 81,59 % dengan kategori **(A) Memuaskan**.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor per komponen*)
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,41	88,04	A
2	Pengukuran Kinerja	30%	28,75	95,83	AA
3	Pelaporan Kinerja	15%	7,80	52,02	CC
4	Evaluasi Kinerja	25%	18,63	74,50	BB
Total		100%	<b>81,59</b>		

**Tabel 2.3 Hasil Evaluasi Tahun 2022**

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Jombang mengalami penurunan yang semula 82,92 menjadi 81,59 (A). Hal ini disebabkan dengan adanya perubahan mekanisme penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP dapat dilihat implementasi SAKIP pada Inspektorat mengalami sedikit penurunan nilai. Beberapa catatan terkait dengan kualitas pelaporan kinerja dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) dalam implementasi SAKIP tahun 2022.

### 1. Catatan Hasil Evaluasi

- a) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja sasaran kurang menantang. Penetapan target pada 2 indikator sasaran terlalu kecil (Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP) dan belum tertuang dengan detail pada definisi operasional, meskipun sudah dijelaskan dengan singkat cara pencapaiannya.
- b) Anggaran yang ditetapkan belum sepenuhnya mengacu pada perencanaan kinerja jangka menengah yang ditetapkan hal ini dapat dilihat pada tahun 2021 pada Inspektorat Kabupaten Jombang terdapat penambahan pegawai sebanyak 16 orang namun anggaran yang digunakan tidak ada perubahan.

- c) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum menyajikan efisiensi atas sarana prasarana, hanya menyajikan efisiensi sumber daya keuangan dan sumber daya manusia
- d) Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja. Dalam melakukan penyesuaian anggaran hanya didasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah, adanya perubahan target kinerja dan sumberdaya manusia serta kondisi terkini belum dijadikan dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran
- e) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level daerah/nasional (Benchmark Kinerja)
- f) Informasi dalam laporan kinerja belum dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
- g) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

## 2. Saran Perbaikan

Berdasarkan catatan hasil evaluasi diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan implementasi system akuntabilitas kinerja OPD, saran perbaikannya sebagai berikut:

- a) Berkoordinasi dengan bagian organisasi Sekretariat Daerah dan Bappeda Kabupaten Jombang untuk : Penetapan target pada 2 indikator sasaran yang terlalu kecil (Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP) dan selanjutnya menuangkan pada definisi operasional indikator sasaran OPD.
- b) Besaran anggaran yang sampai dengan saat evaluasi tidak sesuai dengan peraturan yang mendasari penyusunan anggaran inspektorat.
- c) Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- d) Menambahkan informasi efisiensi atas sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja.
- e) Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk

penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.

- f) Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level daerah/nasional pada dokumen LKJIP.
- g) Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar perbaikan budaya kerja pada Inspektorat.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

##### **TUJUAN :**

**“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”**

Untuk mewujudkan tujuan yang dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Jombang, maka sasaran strategis yang dicapai adalah “Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel” dan “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah”.

Sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis tersebut maka Inspektorat Kabupaten Jombang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Maturitas SPIP
2. Kapabilitas APIP
3. Nilai Evaluasi AKIP PD

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
  - b. Pendampingan dan Asistensi

## 2.2. Rencana Kerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahun 2022 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2022. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2021. Rencana kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2021.

## 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara Inspektur Kabupaten Jombang dan tanggung jawab kinerja dengan Bupati Jombang dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2022 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola yang didukung dengan program/kegiatan yang didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Maturitas SPIP	Level 3 (3,35)
		Kapabilitas APIP	Level 3
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	A (83)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
<b>A.</b>	<b>Program Utama</b>	<b>Rp. 1.071.834.400</b>	P-APBD TA 2022
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 630.395.770	P-APBD TA 2022
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 441.438.630	P-APBD TA 2022
<b>B.</b>	<b>Program Penunjang</b>	<b>Rp. 12.281.319.513</b>	P-APBD TA 2022
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.281.319.513	P-APBD TA 2022

*Sumber : DPPA Inspektorat Tahun Anggaran 2022*

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS**

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2021. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2021 disajikan juga dalam bab ini. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data kinerja selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$\geq 91$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017 Tabel T-E.1

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, Inspektorat Kabupaten Jombang mendukung Misi ke-1 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional” tujuan ke 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.



Salah satu Indikator tercapainya sasaran tersebut adalah Nilai SAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD. Inspektorat mempunyai tupoksi dalam SAKIP terutama terkait pengawasan internal yaitu evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mewujudkan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dengan indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi maka Inspektorat yang mempunyai tupoksi dibidang urusan pengawasan, pada tahun 2022 melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman kepada OPD tentang pentingnya implementasi SAKIP, sehingga Pimpinan dan Staf OPD mempunyai Komitmen dalam Penerapan SAKIP.
2. Melaksanakan Koordinasi dengan OPD terkait;
3. Sebagai Tim SAKIP Kabupaten dengan OPD terkait;
4. Melaksanakan Koordinasi Ke Biro Organisasi Provinsi;

5. Melakukan kegiatan pra evaluasi SAKIP OPD
6. Melakukan Reviu LPPD Kabupaten dan Evaluasi SAKIP OPD
7. Pendampingan terkait Sasaran, Indikator dan Target pada Renstra Perubahan 2019-2023 kepada OPD;

Langkah-langkah sebagaimana tersebut diatas telah dilaksanakan Inspektorat untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang.

Dari Kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator Sasaran Kabupaten sebagaimana tersebut diatas maka Pengukuran Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	Level 3 (3,35)	Level 3 (3,157)	94,24%	Sangat Tinggi
		Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai A (83)	Nilai A (82,92)	98,30%	Sangat Tinggi

Sumber: diolah, Inspektorat 2023

Dari tabel di atas terdapat satu sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja. Pada Tahun 2022, semua realisasi indikator telah mencapai target yang ditetapkan yaitu telah mencapai 100% bahkan lebih, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Jombang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur dengan hasil Level 3 nilai 3,157 **(data terlampir)**.
2. Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Jombang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur dengan hasil Level 3 **(data terlampir)**.

3. Hasil Nilai Evaluasi AKIP PD Inspektorat Kabupaten Jombang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Jombang dengan nilai 3,157 (A). **(data terlampir)**

Selanjutnya semua indikator kinerja telah memenuhi klasifikasi sangat tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

### **Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Pada Tahun 2022, terdapat satu sasaran strategis yang dicerminkan dalam capaian 3 (tiga) indikator kinerja telah dilakukan pengukuran dan 1 (satu) dari 3 (tiga) dari indikator kinerja tersebut telah mencapai target yang ditetapkan pada Tahun 2022. Dengan adanya RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, maka diikuti dengan penyusunan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Secara rinci, indikator kinerja akan dilakukan penjabaran sebagai berikut :

#### **Sasaran 1. Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas dan Akuntabel**

Sasaran “Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas dan Akuntabel” diukur menggunakan 2 (dua) indikator, sebagai berikut:

1. Maturitas SPIP.

Rumusan indikator kinerja adalah Level Maturitas SPIP. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu :

<b>Level</b>	<b>Tingkat</b>	<b>Karakteristik SPIP</b>
0	Belum Ada	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
1	Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
2	Berkembang	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Level	Tingkat	Karakteristik SPIP
3	Terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4	Terkelola dan Terukur	K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5	Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Sejalan dengan hasil penilaian maturitas SPIP yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat, Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Jombang sesuai laporan hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor PE.09.03/LHP- 913/PW13/3/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar **3,157**. Dengan rincian penilaian sebagai berikut :

**HASIL PENILAIAN CEPAT  
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2022**

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	4,000	2,000
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3,000	1,500
<b>SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN</b>	<b>100,00%</b>		<b>3,500</b>
<b>BOBOT PENETAPAN TUJUAN</b>	<b>40,00%</b>		<b>1,400</b>
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>			
Lingkungan Pengendalian	30,00%	2,850	0,842
Penilaian Risiko	20,00%	2,583	0,517
Kegiatan Pengendalian	25,00%	3,000	0,750
Informasi dan Komunikasi	10,00%	3,000	0,300
Pemantauan	15,00%	3,000	0,450
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>100,00%</b>		<b>2,858</b>
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>30,00%</b>		<b>0,857</b>
<b>PENCAPAIAN TUJUAN</b>			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	15,00%	3,000	0,450
Capaian <i>Output</i>	15,00%	4,000	0,600
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25,00%	3,000	0,750
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Administrasi	10,00%	3,000	0,300
Keamanan Fisik	5,00%	2,000	0,100
Keamanan Hukum	10,00%	2,000	0,200
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20,00%	3,000	0,600
<b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN</b>	<b>100,00%</b>		<b>3,000</b>
<b>BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN</b>	<b>30,00%</b>		<b>0,900</b>
<b>NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>			<b>3,157</b>

## 2. Kapabilitas APIP.

Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian Kapabilitas APIP terdiri atas 3 komponen dan 6 elemen, yaitu:

KOMPONEN	BOBOT (%)	ELEMEN	BOBOT (%)
Dukungan Pengawasan	60	Pengelolaan SDM	30
		Praktik Profesional	30
		Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	10
		Budaya dan Hubungan Organisasi	10
		Struktur Tata Kelola	20
Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan	40	Peran dan Layanan APIP	100

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumberdaya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Semakin tinggi nilai level kapabilitasnya maka semakin baik upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Hasil *Quality Assurance* yang dilakukan BPKP Perwakilan Jawa Timur terhadap 24 Key Process Area (KPA) dari 6 elemen dan 151 pernyataan untuk tingkat kapabilitas APIP level 3 menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Jombang berada pada **“Level 3” (delivered)**. Sebagaimana uraian berikut :

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1.	Pengelolaan SDM	0,54	3	0,54	3
2.	Praktik Profesional	0,54	3	0,54	3
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,18	3	0,18	3
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,18	3	0,18	3
5.	Struktur Tata Kelola	0,36	3	0,36	3
6.	Peran dan Layanan	1,20	3	1,20	3
Simpulan entitas		3,00	3	3,00	3

## Sasaran 2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah” diukur menggunakan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Evaluasi AKIP PD

### Nilai Evaluasi AKIP PD

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Komponen penilaian SAKIP antara lain :

KOMPONEN/SUB KOMPONEN/KRITERIA	BOBOT (%)
<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>
PEMENUHAN	6,00
KUALITAS RENSTRA	9,00
IMPLEMENTASI	15,00
<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>
PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA	6,00
KUALITAS PENGUKURAN	9,00
IMPLEMENTASI PENGUKURAN	15,00
<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15,00</b>
PEMENUHAN PELAPORAN	3,00
PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	4,50
PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	7,50
<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	<b>25,00</b>
PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	5,00
KUALITAS EVALUASI	7,50
PEMANFAATAN EVALUASI	5,00

Berdasarkan Evaluasi SAKIP Inspektorat tahun 2022 sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor per komponen*)
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,41	88,04	A
2	Pengukuran Kinerja	30%	28,75	95,83	AA
3	Pelaporan Kinerja	15%	7,80	52,02	CC
4	Evaluasi Kinerja	25%	18,63	74,50	BB
Total		100%	<b>81,59</b>		

### 3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Tahun 2022)

Target dan realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas dan Akuntabel dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3 Capaian Kinerja  
Sasaran**

No	Tujuan/Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel						
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	1	Maturitas SPIP	Level 3 (3,35)	Level 3 (3,157)	94,24%
		2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	3	Nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai A (83)	Nilai A (81,59)	98,30%

Sumber : diolah, Inspektorat 2022

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran secara rata-rata mencapai 97,51%. Sasaran ini didukung oleh seluruh Inspektur Pembantu Bidang, Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Umum yang ada di Inspektorat. Keberhasilan pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis ini tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang dilakukan melalui :

#### a) Maturitas SPIP

1. Koordinasi dan Konsultasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penilaian Maturitas SPIP.
2. Melakukan rekonsiliasi tindak lanjut hasil pengawasan antara APIP dengan OPD terkait.
3. Melakukan pendampingan dan reuiu Register Risiko pada seluruh OPD dengan menetapkan daftar risiko atas kegiatan pokok dan menetapkan rencana tindak pengendalian.
4. Melaksanakan Pelatihan Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi sebagai upaya pengendalian sistem Infromasi.
5. Melaksanakan audit pendapatan sebagai upaya pengendalian penerimaan pendapatan.
6. Melaksanakan reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sebagai upaya memberikan keyakinan terbatas



terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan kepada BPK.

7. Melaksanakan evaluasi Reformasi Birokrasi (SAKIP, PMPRB, ZI) untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD.

b) Kapabilitas APIP

1. Pendampingan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pengisian aplikasi IACM serta dokumen-dokumen untuk kelengkapan elemen.
2. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik dan terus menerus, serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.
3. Melakukan *Self Assessment* secara berkala untuk menjaga dan mempertahankan Kapabilitas APIP level 3 pada 6 elemen Kapabilitas APIP.
4. Mengikuti webinar dan seminar terkait peningkatan kapabilitas APIP yang diselenggarakan baik oleh BPKP Pusat Jakarta maupun oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur.

c) Nilai Evaluasi AKIP PD

1. Melaksanakan reviu Dokumen Perencanaan untuk memastikan adanya keterpaduan perencanaan antara RPJMD, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Inspektorat dan melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi.
2. Koordinasi secara intens dengan BPKP dalam upaya pencapaian target kinerja utama yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja agar tercapai 100% atau lebih.
3. Telah menyusun aplikasi dalam penyusunan dan pengumpulan data kinerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas pada proses pengumpulan data kinerja.
4. Melaksanakan koordinasi dengan tim evaluasi internal dan tim penyusun dokumen SAKIP setiap tribulan.

Selanjutnya untuk Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi Indikator Sub Kegiatan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dalam rangka penyamaan indikator sub kegiatan di seluruh Indonesia.

Terkait Kapabilitas APIP yang ditargetkan Level III, hal ini sesuai dengan perintah Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2015. Penilaian kapabilitas seluruh organisasi APIP di Indonesia merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah secara nasional yang dituangkan dalam ketentuan, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dimana APIP diharapkan memiliki kapabilitas pada Level 3 (integrated);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

### 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi		
					2022	2021	2020
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas Dan akuntabel	1	Persentase Tindak Lanjut Selesai (Administrasi dan Keuangan)	N/A		N/A	92,87%
		2	Persentase OPD yang telah melaksanakan ZI menuju WBK	N/A		N/A	3,77%
		3	Persentase LK SKPD sesuai SAP	N/A		N/A	100%
		4	Nilai Reformasi Birokrasi	N/A		N/A	60
		5	Maturitas SPIP	Level 3 (3,35)	Level 3 (3,157)	Level 3 (3,346)	Level 3 (3,02)
		6	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	N/A
		7	Nilai Evaluasi AKIP PD	A (83)	A (81,59)	A (82,92)	N/A

Sumber : diolah, Inspektorat 2022

Dari tabel 3.4 dapat diketahui bahwa hanya indikator Kinerja Sasaran “Maturitas

SPIP” yang dapat diperbandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya. Hal ini tampak pada Nilai Maturitas SPIP pada Tahun 2021 sebesar 3,346 menurun pada Tahun 2022 menjadi 3,157. Hal ini karena indikator penilaian pada SPIP yang baru. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	1,400
2.	Struktur dan Proses	30%	0,857
3.	Pencapaian Tujuan	30%	0,900
	<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>		<b>3,157</b>
	<b>Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)</b>		<b>2,900</b>
	<b>Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)</b>		<b>2,832</b>

Sesuai rekomendasi BPKP bahwa untuk meningkatkan Maturitas SPIP, dirapkan Pemerinatah Kabupaten Jombang untuk :

1. Mendorong implementasi manajemen risiko, melalui :
  - a) mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko;
  - b) meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai terkait manajemen risiko;
  - c) melakukan identifikasi dan analisis risiko kemitraan
  - d) melakukan identifikasi dan analisis risiko strategis tingkat pemerintah daerah ;
  - e) memantau pelaksanaan manajemen risiko
2. Mendorong upaya pencegahan korupsi, melalui :
  - a) menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga prinsip, yakni cegah, deteksi, dan respons;
  - b) mendukung program anti korupsi dengan penyediaan alokasi sumberdaya secara eksplisit dan memadai;
  - c) melakukan mitigasi risiko korupsi

Untuk indikator Kinerja Kapabilitas APIP telah mencapai target yaitu Level 3

sehingga capaiannya 100%. Sedangkan Nilai Evaluasi AKIP PD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 karena adanya LKE baru serta perlunya memperbaiki pelaporan kinerja serta agar bisa laporan capaian kinerja dapat menjadi acuan pada tahun 2023.

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target akhir Renstra yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

**Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra	Capaian Realisasi
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan Akuntabel						
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	1	Maturitas SPIP	Level 3 (3,157)	Level 3 (3,6)	87,69%
		2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	3	Nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai A (81,59)	Nilai A (83)	98,30%

Sumber : diolah, Inspektorat 2022

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa kinerja Inspektorat pada Tahun 2022 secara garis besar mengalami progress positif dan telah sesuai dengan yang telah direncanakan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target Maturitas SPIP tercapai sebesar 87,69%, sehingga belum mencapai target akhir Perubahan Renstra.
2. Target Kapabilitas APIP telah tercapai sebesar 100%, dan telah mencapai target akhir Perubahan Renstra.
3. Target Nilai Evaluasi AKIP PD yang telah tercapai sebesar 98,30% sehingga belum mencapai target akhir Perubahan Renstra.

### 3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional

Sebagaimana rekomendasi Tim Evaluator SAKIP Tahun 2022 pada Rekomendasi keempat yaitu “ 4. Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level daerah/nasional pada dokumen LKJIP.” Maka data pembanding yang dipakai oleh Inspektorat Kabupaten Jombang untuk membandingkan realisasi kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang yang dapat dipakai yaitu data pembanding dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang.

Adapun untuk level daerah yang dapat dipakai adalah Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Jombang yang diperoleh nilai tersebut dari Kementerian PAN dan RB.

Sedangkan terkait untuk target Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, untuk level daerah yang dapat dipakai adalah Laporan Penilaian Maturitas SPIP Provinsi Jawa Timur dan Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Jombang.

Adapun data perbandingannya dapat dijelaskan sbb. :

**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi Daerah	Ket.
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan Akuntabel						
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	1	Maturitas SPIP	Level 3 (3,157)	Level 3 (3,141)	Dibandingkan dengan Nilai Maturitas SPIP Provinsi Jawa Timur
		2	Kapabilitas APIP	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,00)	Dibandingkan dengan Nilai Maturitas SPIP Provinsi Jawa Timur
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	3	Nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai A (81,59)	Nilai BB (72,14)	Dibandingkan dengan Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang

Sumber : Data diolah, 2022

Dari data tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi 2 (dua) indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang melebihi dari realisasi kinerja di atasnya, yaitu “Maturitas SPIP” dan “Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah”

Pada indikator “Maturitas SPIP”, Pemerintah Kabupaten Jombang lebih unggul daripada realisasi level di atasnya, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahwa realisasi Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Jombang tercapai 1,157 (Level 3), sedangkan realisasi Maturitas SPIP Provinsi Jawa Timur tercapai 1,141 (Level 3). Hal ini berarti realisasi indikator kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Jombang lebih unggul 0,13 poin nilai.

Pada indikator “Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah”, Inspektorat Kabupaten Jombang lebih unggul daripada realisasi level di atasnya, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jombang. Bahwa realisasi Evaluasi AKIP PD Inspektorat Kabupaten Jombang tercapai 81,59 (Nilai A), sedangkan realisasi Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Jombang 72,14 (Nilai BB). Hal ini berarti realisasi indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP PD lebih unggul dari Pemerintah Kabupaten Jombang 7,45 poin nilai.

### **3.1.5. Analisis Realisasi Kinerja**

Pencapaian kinerja indikator sasaran “Maturitas SPIP”, “Kapabilitas APIP” dan “Nilai Evaluasi AKIP PD” tidak diperoleh dengan mudah, ada faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaiannya yang terdokumentasi dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat serta Tindak Lanjut Sasaran**

<b>Faktor Pendorong</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen dari segenap pegawai Inspektorat dalam upaya Peningkatan Level Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, dan Nilai SAKIP OPD.</li> <li>2. Adanya komunikasi yang efektif antara staf, rekan kerja maupun dengan atasan baik di level staf maupun pimpinan. Serta komunikasi yang efektif antara APIP, BPKP, Aparat Pengawas Eksternal (BPK RI), Auditee dan Aparat Penegak Hukum.</li> <li>3. Adanya upaya terus menerus oleh APIP kepada OPD dalam memetakan risiko di masing-masing OPD.</li> <li>4. Kerjasama yang baik intern Inspektorat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Register Risiko dalam mencapai target kinerja OPD belum menjadi perhatian dari OPD.</li> <li>2) Kurangnya <i>update</i> data atas kegiatan Inspektorat yang mendukung penilaian Kapabilitas APIP.</li> <li>3) Jenis Pemeriksaan dan Jumlah Obyek Pemeriksaan yang berupa mandatory dari pemerintah pusat atas kondisi terkini menyebabkan banyaknya penugasan di luar PKPT.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendampingan konsultasi kepada auditan (OPD) berupa sosialisasi, review Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian pada seluruh OPD.</li> <li>2. Melakukan <i>update</i> data secara berkala atas pemenuhan elemen penilaian kapabilitas APIP.</li> <li>3. Melakukan koordinasi yang baik dan secara terus menerus dengan BPKP dalam upaya mempertahankan Kapabilitas APIP (Level 3).</li> <li>4. Dilaksanakannya Perubahan PKPT untuk penyesuaian atas tugas mandatory.</li> <li>5. Secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja intern Inspektorat.</li> </ol>

*Sumber : diolah, Inspektorat 2022*

### **3.2. REALISASI ANGGARAN**

#### **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja**

Maturitas SPIP, didukung oleh program sebagai berikut : Program Penyelenggaraan Pengawasan

Sehubungan dengan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, maka dilakukan penilaian Level Maturitas SPIP. Anggaran yang dialokasikan untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan dengan total anggaran program anggaran Rp. 630.395.770,00. Hasil-hasil pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan yang telah dicapai pada Tahun 2022, antara lain :

- a. Pelaksanaan penilaian Maturitas SPIP dengan pendampingan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan hasil Quality Assurance dari BPKP Perwakilan Jawa Timur bahwa Kabupaten Jombang Maturitas SPIP berada



pada Level 3 dengan nilai 3,157.

- b. Pelaksanaan penilaian kapabilitas APIP secara self asesment telah mencapai Level 3.
  - c. Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah meliputi probity audit, audit kinerja dan Evaluasi SAKIP.
  - d. Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi Monitoring dan Evaluasi PPRG, Pengawasan Kepatuhan, Monitoring dan Evaluasi BOS/BOSDA, audit dana hibah dan bantuan sosial.
  - e. Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja meliputi Reviu Perencanaan dan Penganggaran (RKA, P-RKA, KUA PPAS, P-KUA PPAS, RKPD, P-RKPD), Reviu LPPD, Reviu Lain-lain (Reviu HPS, Reviu HSPK/ASB, Reviu SSH), dan Reviu DAK.
  - f. Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan meliputi Reviu LKPD dan Reviu LK SKPD.
  - g. Terlaksananya Pengawasan Desa di 150 Desa.
  - h. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik pengawasan BPK maupun APIP, hal ini ditunjukkan dengan terbitnya Laporan Tindak Lanjut dan Laporan Ikhtisar Pengawasan.
4. Kapabilitas APIP, didukung oleh program sebagai berikut : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.
- Sehubungan dengan penguatan Kapabilitas APIP dalam memperkuat kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif, maka dilakukan penilaian Kapabilitas APIP. Anggaran yang dialokasikan untuk Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan total anggaran program anggaran Rp. 441.438.630,00.
- Hasil-hasil pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan yang telah dicapai pada Tahun 2022, antara lain :
- a. Telah dilaksanakan penerbitan perumusan kebijakan teknis terkait pengawasan di Inspektorat Kabupaten Jombang yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan serta Perubahan Pertama dan Kedua Tahun 2022.
  - b. Telah dilaksanakan Penilaian PMPRB untuk 10 OPD, Penilaian Zona

Integrasi untuk 6 OPD, Reviu Registrasi Resiko untuk seluruh OPD di Kabupaten Jombang, Evaluasi SPIP untuk 10 OPD (salah satunya Kabupaten), Sosialisasi Gratifikasi yang intens, Pelaksanaan upaya pencegahan korupsi melalui *Monitoring Center For Prevention* Korsupgah KPK serta peran aktif Tim Saber Pungli dan Pelaksanaan Verifikasi LHKASN seluruh PNS Kabupaten Jombang (dikecualikan wajib lapor LHKPN)

5. Nilai Evaluasi AKIP PD, didukung oleh program sebagai berikut : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sehubungan dengan pencapaian Nilai SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**SAKIP**) yang digunakan untuk mengetahui apakah kementerian, lembaga, pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, maka indikator kinerja ini mengampu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran yang dialokasikan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas 8 (delapan) kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan dengan total anggaran program anggaran Rp. 12.281.319.513,00.

Hasil-hasil pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah dicapai pada Tahun 2022, antara lain:

- a. Telah dilaksanakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu Penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2018-2023, Renja 2022 dan Perubahan Renja 2021.
- b. Telah dilaksanakan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu pemenuhan gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai selama 14 bulan (termasuk gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya atau disebut gaji 14).
- c. Telah terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang meliputi pemenuhan kebutuhan peralatan listrik, logistik kantor, bacaan harian, perlengkapan kantor dan kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah
- d. Telah terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi pemenuhan kebutuhan listrik kantor, kebutuhan pelayanan telepon, pemenuhan alat tulis kantor, alat

kebersihan, tenaga kebersihan pihak ketiga, jasa pengharum ruangan, dan honor pengelola keuangan

- e. Telah terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi pemeliharaan 1 unit kendaraan dinas jabatan, 18 unit kendaraan dinas operasional baik roda 2 maupun roda 4 dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor meliputi perbaikan/ pemeliharaan laptop, printer, AC kantor, dan perbaikan keramik rumah dinas.
- f. Telah terlaksananya kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya meliputi pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan guna mendukung kinerja APIP yaitu pengadaan mebel

### 3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dan realisasi anggaran

Realisasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran TA. 2022 dapat disajikan sbb. :

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022**

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %
Sasaran : Meningkatkan Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	Level 3 (3,35)	Level 3 (3,157)	94,24			
	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100			
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai A (83)	Nilai A (81,59)	98,30			
	Rata-rata capaian Indikator Utama (Sasaran)			97,51			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100,00	12.281.319.513	11.534.782.463	93,92
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut hasil Pengawasan selesai (APIP dan BPK)	93	86,71	93,24	630.395.770	524.058.289	83,13

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang diterbitkan	100	100	100,00	441.438.630	382.861.036	86,73
	Persentase tindak lanjut selesai atas rekomendasi asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal	80	80	100,00			
	<b>Rata-rata capaian Indikator Utama (Program)</b>			98,31			
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				13.353.153.913	12.441.701.788	93,17

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian indikator utama (Sasaran) sebesar 97,51%, sedangkan rata-rata capaian indikator program tercapai 98,31% dan rata-rata capaian anggaran tahun 2023 sebesar 93,17%. Dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja utama, kinerja program dan anggaran dianggap Sangat Tinggi.

### 3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### 1) Efisiensi Anggaran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya khususnya anggaran seminimal mungkin dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan. Guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	%Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya hasil akuntabel	Maturitas SPIP	94,24%	83,13%	11,11%
		Kapabilitas APIP	100%	86,73%	13,27%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	98,30%	93,92%	4,38%

Sumber : diolah, Inspektorat 2022

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan tingkat capaian kinerja penggunaan sumber daya dari sasaran Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel dengan indikator sasaran :

a. Maturitas SPIP

Prosentase Efisiensi Kinerja dari Maturitas SPIP sebesar 11,11%.

b. Kapabilitas APIP

Prosentase Efisiensi Kinerja dari Kapabilitas APIP 13,27%

c. Nilai Evaluasi AKIP PD

Prosentase Efisiensi Nilai Evaluasi AKIP PD sebesar 4,38%.

## 2) Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kebutuhan pegawai Berdasarkan Analisa Beban Kerja pemenuhan kebutuhan pegawai seharusnya sebanyak 75 orang Auditor, 7 orang pejabat struktural dan 10 Jabatan Fungsional Umum. Sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah pemenuhan pegawai di Inspektorat Kabupaten Jombang sejumlah 74 orang, sehingga prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai sebesar 80,44%. Dengan jumlah SDM yang masih terbatas namun capaian kinerja pada Tahun 2022 telah tercapai dengan predikat Sangat Baik pada semua indikator Kinerja Sasaran bahkan ada yang mencapai sebesar 100% bahkan lebih.

**Tabel 3.10 Efisiensi Sumber Daya Manusia**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketersediaan SDM	% Efisiensi
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	94,24%	80,44%	17,07%
		Kapabilitas APIP	100%		
		Nilai Evaluasi AKIP PD	98,30%		

Sumber : diolah, Inspektorat 2022

Dari tabel di atas, terdapat efisiensi Sumber Daya Manusia sebesar 17,07% dari rata-rata capaian kinerja sebesar 97,51% dikurangi ketersediaan Sumber Daya Manusia sebanyak 74 orang atau 80,44%.

## 3) Efisiensi Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kinerja perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup dan dalam kondisi yang baik. Berikut sarana dan prasarana Inspektorat Kabupaten Jombang untuk menunjang kinerja OPD. Berikut disajikan Klasifikasi Aset/ Modal Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang :

**Tabel 3.11 Klasifikasi Aset / Modal maupun Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang**

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah tersedia	Satuan	Keterangan	Jumlah Kebutuhan	Kekurangan
1.	Gedung Kantor	1	unit	Baik	1	0
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	9	unit	Baik/ Jumlah Kurang	12	-3
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	10	unit	Baik	10	0
4.	Peralatan Lab	10	unit	Baik	10	0
5.	Pompa Air	2	unit	Baik	2	0
6.	Pendingin Ruangan	35	unit	Baik	40	-5
7.	Filling Besi/Metal	17	unit	Baik	17	0
8.	Rak Kayu	20	unit	Baik	20	0
9.	Meja Kayu	27	unit	Baik/ Jumlah Kurang	44	-17
10.	Meja Tulis	16	unit	Baik/ Jumlah Kurang	30	-14
11.	Kursi	114	unit	Baik/ Jumlah Kurang	134	-20
12.	Laptop	25	unit	Baik/ Jumlah Kurang	49	-24
13.	Printer	34	unit	Baik/ Jumlah Kurang	41	-7
14.	Meja Kerja Eselon	9	unit	Baik	9	0
	Jumlah	329			419	-90

Berdasar data di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah pemenuhan sarana dan prasarana di Inspektorat Kabupaten Jombang sejumlah 329 unit, dengan kebutuhan sarpras sejumlah 419 unit sehingga prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebesar 78,52%. Dengan jumlah sarpras yang masih terbatas namun capaian kinerja pada Tahun 2022 telah tercapai dengan predikat Sangat Baik pada semua indikator Kinerja Sasaran bahkan ada yang mencapai sebesar 100% bahkan lebih.

Sesuai dengan rekomendasi kedua Tim Evaluator SAKIP Tahun 2022 bahwa “Menambahkan informasi efisiensi atas sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja”, maka berikut disajikan efisiensi sarana dan prasarana Inspektorat Kabupaten Jombang, sbb. :

**Tabel 3.12 Efisiensi Sarana dan Prasarana**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketersediaan Sarpras	% Efisiensi
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	94,24%	78,52%	18,99%
		Kapabilitas APIP	100%		
		Nilai Evaluasi AKIP PD	98,30%		

Sumber : data diolah, 2022

Dari tabel di atas, terdapat efisiensi sarana prasarana sebesar 18,99% dari rata-rata capaian kinerja sebesar 97,51% dikurangi ketersediaan Sumber Daya Manusia sebanyak 329 unit atau 78,52%.

### Capaian Kinerja Anggaran

Pengukuran pencapaian kinerja anggaran adalah berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPPA APBD Tahun 2022. Adapun Jumlah APBD Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 13.353.153.913,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.441.701.788,00 atau mencapai 93,17% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.13 Jumlah Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2022**

No.	Program / Kegiatan	Alokasi Biaya		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
	<b>Inspektorat Kabupaten Jombang</b>			
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.281.319.513	11.534.782.463	87,2
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.337.000	113.596.500	93,6
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.568.348.933	9.943.472.120	94,1
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	700.000	354.002	50,6

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	291.197.507	281.058.110	96,5
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	461.173.073	408.502.503	88,6
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000	5.000.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	515.068.000	490.476.887	95,2
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.495.000	292.322.341	91,8
No.	Program / Kegiatan	Alokasi Biaya		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	630.395.770	524.058.289	70,16
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	600.664.770	507.455.689	84,5
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	29.731.000	16.602.600	55,8
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	441.438.630	382.861.036	84,01
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	66.132.163	52.985.500	80,1
	Pendampingan dan Asistensi	375.306.467	329.875.536	87,9
<b>JUMLAH</b>		<b>13.353.153.913</b>	<b>12.441.701.788</b>	<b>93,17</b>

### 3.2. Upaya Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkan-kembangkan budaya kinerja, selama tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai berikut :

1. Telah melakukan revisi target Maturitas SPIP melalui Kertas Kerja Penetapan Target untuk menentukan target yang sesuai.
2. Telah mengirim surat usulan kebutuhan anggaran dan telah dipenuhi pada awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 400.000.000,00 pada 2 (dua) Sub Kegiatan Pengawasan.
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang menggunakan Teknologi Informasi akan diterapkan pada Evaluasi SAKIP Tahun 2023 melalui aplikasi yang akan diluncurkan oleh Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Jombang untuk seluruh OPD.
4. Informasi terkait efisiensi atas sarana dan prasarana telah dicantumkan dalam laporan kinerja Tahun 2022.
5. Informasi dalam laporan kinerja dipakai sebagai dasar dalam penentuan perencanaan tahun berikutnya, dibuktikan dengan penyusunan kertas kerja



penetapan target yang membahas capaian tahun sebelumnya

6. Realisasi kinerja di level daerah/ nasional telah dicantumkan dengan pembandingan Inspektorat Provinsi Jawa Timur (Kapabilitas APIP), Provinsi Jawa Timur (Maturitas SPIP) dan Pemerintah Kabupaten Jombang (Nilai AKIP)
7. Informasi dalam laporan kinerja dipakai sebagai masukan untuk perbaikan budaya kerja Inspektorat Kabupaten Jombang, hal ini dibuktikan dengan adanya rapat koordinasi setiap bulan dan tribulanan baik untuk membahas capaian kinerja maupun anggaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang.

Secara umum pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Jombang Tahun 2022 adalah sebesar 97,51%. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis, Inspektorat Kabupaten Jombang mendapatkan alokasi dana APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 13.353.153.913,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.441.701.788,00 atau mencapai 93,17%.

Secara keseluruhan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jombang telah berada pada Sangat Baik yaitu Maturitas SPIP mencapai 94,24%, Kapabilitas APIP mencapai 100%, dan Nilai Evaluasi AKIP PD mencapai 98,30%. Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang pada Tahun 2022 masih ditemui sejumlah kendala/hambatan yang akan menjadi fokus perbaikan kinerja sebagai berikut :

1. Masih terdapat rekomendasi hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti oleh *Auditee* atau OPD terkait.
2. Belum dilakukan sosialisasi monitoring pengendalian risiko kepada OPD dalam mengidentifikasi Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian secara berkelanjutan dan memadai sebagai proses penerapan manajemen risiko pada proses bisnis organisasi.
3. Kompetensi dan keterampilan pegawai terkait manajemen risiko di Inspektorat dan OPD belum memadai.
4. Upaya pencegahan korupsi yang diamanahkan dalam MCP kurang maksimal.
5. Belum dilakukan evaluasi atas pengendalian Sistem Informasi.
6. Belum optimalnya evaluasi atas pengamanan aset.
7. Belum tertibnya APIP dalam melakukan *self assessment* kapabilitas APIP secara berkala dalam menjaga dan mempertahankan level kapabilitas APIP.

8. Belum melakukan revidir dokumen perencanaan secara berkala untuk memastikan adanya keterpaduan perencanaan antara RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang.
9. Belum meratanya kompetensi auditor khususnya Calon PNS pada formasi auditor.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat banyak kendala dan hambatan dalam proses pencapaian target kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang sehingga ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di antaranya sebagai berikut :

1. Melakukan rekonsiliasi tindak lanjut hasil pengawasan dengan OPD terkait.
2. Melakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi pengendalian Risiko kepada seluruh OPD sebelum dilakukan identifikasi ulang atas penetapan daftar risiko kegiatan pokok dan Rencana Tindak Pengendalian secara berkelanjutan dan memadai sebagai proses penerapan manajemen risiko pada proses bisnis organisasi.
3. Mengalokasikan anggaran dan kegiatan peningkatan kompetensi dan keterampilan pegawai terkait manajemen risiko.
4. Melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam PKPT yang mendorong upaya pencegahan korupsi yang diukur melalui aplikasi MCP.
5. Melakukan Audit Kepatuhan Teknologi Informasi.
6. Melakukan Pemeriksaan/Revidir Barang Milik Daerah (BMD).
7. Melakukan *self assessment* kapabilitas APIP secara berkala dengan didukung dengan pemenuhan dokumen.
8. Melaksanakan revidir dokumen perencanaan untuk memastikan adanya keterpaduan perencanaan antara RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang.
9. Mengalokasikan kegiatan peningkatan kompetensi khususnya Calon PNS formasi auditor dalam bentuk Bimtek/Diklat/Sosialisasi/PKS.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai panduan evaluasi atas tahun-tahun sebelumnya dan menjadi pedoman perbaikan untuk tahun kedepan sehingga seluruh target yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang dapat tercapai.

**Jombang, 30 Januari 2023**

**INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG**



**ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., MSI.**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19670105 199212 1 001**